

BAB IV

UPAYA UNHCR MELALUI *TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS* DALAM MENANGANI PERMASALAHAN PENGUNGSI LIBYA DI ITALIA TAHUN 2016-2018

UNHCR berperan melindungi pengungsi dan membantu mencari solusi bagi para pengungsi, karena masalah pengungsi telah berkembang dalam kompleksitas lebih dari setengah abad lalu. Selain melaksanakan peran-peran pokoknya, UNHCR juga telah berhasil berupaya bersama dengan berbagai aktor terkait; Pemerintah Italia dan LSM-LSM terkait lainnya agar solusi yang diberikan kepada pengungsi sesuai dengan instrumen yang digunakan UNHCR dalam penanganan pengungsi. Dengan mengimplementasikan model *Transnational Advocacy Networks*, dalam bab ini penulis memberikan penjelasan tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh UNHCR melalui peran-peran pokok serta tambahan yang telah dilakukan bersama dengan aktor-aktor terkait lainnya dalam menangani permasalahan pengungsi Libya yang berada di Italia pada tahun 2016-2018.

A. Strategi *Information Politics*

Dalam upaya melalui strategi *Information Politics* melalui website resmi dan berbagai media sosial yang dimiliki, telah terlampir bahwa UNHCR hadir sebagai inisiator dalam selama semua fase prosedur penurunan, baik di lokasi hotspot dan non-hotspot di beberapa lokasi di Italia selatan. Tim lapangan UNHCR memberikan dukungan kepada pihak berwenang, memberikan informasi tentang perlindungan internasional dan skema relokasi kepada Uni Eropa, serta mengidentifikasi orang-orang dengan kebutuhan spesifik. Setelah mendarat, staf UNHCR memberikan selebaran baru tentang perlindungan internasional kepada para pendatang baru dan kemudian melakukan sesi penyediaan informasi tatap muka. Informasi awal dikirim segera setelah pendatang baru diidentifikasi sebelumnya, sementara informasi mendalam

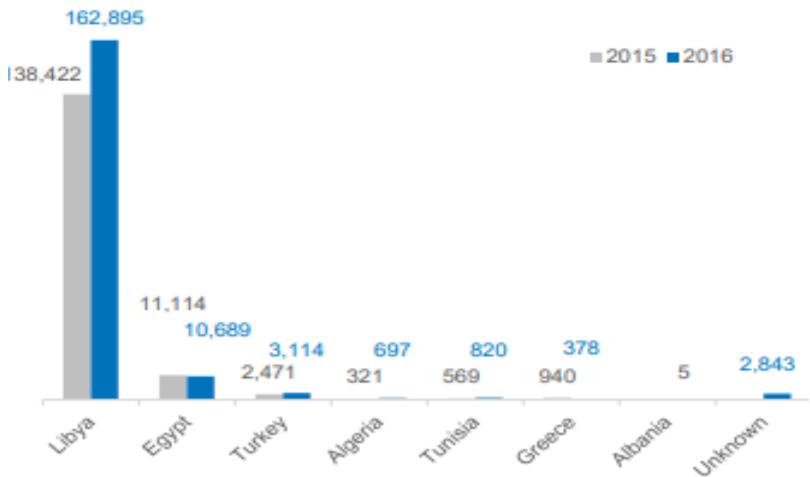
diberikan setelah individu-individu tersebut telah terdaftar (Agency, UNHCR UPDATE #10, 2017).

Sebagian besar kedatangan laut terus pergi dari Libya (sekitar 90%). Pengungsi yang datang telah melaporkan kejadian pelecehan, termasuk penculikan dan penyiksaan, yang terjadi dalam perjalanan melalui gurun Sahara dan di Libya. Lebih sedikit kedatangan berangkat dengan kapal dari Turki, Aljazair, Tunisia, dan Yunani, tetapi Libya tetap menjadi negara keberangkatan utama dengan Sabratha menjadi titik keberangkatan paling umum. Kebanyakan pendatang baru mencapai pantai Italia setelah operasi SAR dilakukan di laut oleh berbagai aktor, termasuk Angkatan Laut Italia, Penjaga Pantai Italia, kapal-kapal oleh negara lain dan berbagai LSM. Terdapat sedikit peningkatan kedatangan otonom di pantai-pantai Sardinia dan Sisilia barat, dimana kebanyakan orang yang mencapai pantai secara mandiri di daerah-daerah ini berasal dari Aljazair dan Tunisia (Agency, UNHCR UPDATE #10, 2017).

Selama prosedur pasca pendaratan, staf UNHCR mendukung pihak berwenang dengan identifikasi orang-orang dengan kebutuhan khusus, terutama masyarakat pengungsi dengan kondisi medis, wanita hamil dan anak-anak yang tidak didampingi, korban trauma dan penyintas penyiksaan atau kekerasan berbasis seksual dan gender (SGBV). UNHCR terus bekerja untuk memperkuat kapasitas pihak berwenang untuk mengidentifikasi orang-orang ini dengan kebutuhan spesifik. Staf UNHCR juga mendukung penyediaan informasi untuk UASC di titik kedatangan dan di fasilitas penerimaan (Agency, UNHCR UPDATE #10, 2017).

Tabel 1.1 : Data Pengungsi dari Libya yang tiba ke Italia pada tahun 2015 dan 2016

Figure 3. Sea arrivals by country of departure | January – December, 2015 and 2016



Sumber: (Agency, UNHCR UPDATE #10, 2017)

Pada 2016 juga, UNHCR juga telah aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Kementerian Dalam Negeri Italia sebagai *ad hoc* yang mendukung otoritas Italia dalam penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang akan diterapkan oleh otoritas yang kompeten di hotspot dengan tujuan untuk memastikan bahwa akses ke wilayah dan ke prosedur suaka diberikan sesuai dengan standar nasional dan internasional. SOP ini diterbitkan pada Mei 2016 dan sedang diimplementasikan sebagai dokumen percontohan. UNHCR memantau implementasi SOP dan menyarankan amandemen yang diperlukan (Agency, UNHCR UPDATE #10, 2017).

Selain itu, UNHCR juga berpartisipasi dalam prosedur Penentuan Status Pengungsi (RSD). Contohnya yaitu dengan anggota staf UNHCR yang dijelaskan dalam data Komisi

Kelayakan Teritorial yang dimana UNHCR melakukan desentralisasi operasional dan memberikan saran tentang penggunaan kriteria kelayakan, standar prosedur, dan informasi negara asal. Kemudian adanya kode Etik untuk staf yang bekerja dalam prosedur RSD dan pedoman untuk rujukan para korban perdagangan orang secara bersama-sama dirancang oleh UNHCR dan Komisi Nasional untuk Hak *Asylum*. Tim pemantauan kualitas UNHCR juga telah menyiapkan rekomendasi untuk meningkatkan sistem suaka dan memastikan peningkatan kualitas. Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Nasional untuk Hak *Asylum*, UNHCR terus terlibat dalam kelompok kerja dalam reformasi prosedur suaka, yang didirikan pada Oktober 2015 (Agency, UNHCR UPDATE #10, 2017).

Pada 31 Desember 2016, sekitar 176.554 masyarakat Libya ditampung di pusat penerimaan di seluruh Italia. Hukum dari Pemerintah Italia menetapkan sistem penerimaan 3 tingkat, terdiri dari: (1) fasilitas bantuan pertama (disebut CPSA) dan hotspot; (2) fasilitas penerimaan lini pertama, termasuk pusat penerimaan pertama (disebut CPA) dan hub regional; (3) fasilitas penerimaan baris kedua (disebut pusat SPRAR, dijalankan oleh Asosiasi Nasional Kota Italia). Jika tidak ada tempat yang tersedia di pusat penerimaan lini pertama atau lini kedua, undang-undang menetapkan bagi orang untuk ditampung di fasilitas sementara, juga dikenal sebagai pusat penerimaan luar biasa, atau disebut juga dengan CAS (Agency, UNHCR UPDATE #10, 2017).

Masyarakat Libya tetap berada di pusat bantuan pertama dan hotspot hanya untuk keperluan menjalani prosedur identifikasi dan sidik jari, sebelum dipindahkan ke pusat penerimaan lini pertama atau lini kedua. Sebagian besar masyarakat saat ini ditampung di pusat-pusat penerimaan sementara. Pada 31 Desember 2016, sekitar 137.218 orang (78% dari total) ditampung di fasilitas sementara, sementara 14.694 (8%) berada di pusat penerimaan lini pertama. Selanjutnya, 23.822 orang (13%) berada di fasilitas penerimaan lini kedua, dan yang terakhir, 820 orang (0,5%) berada di empat hotspot operasional. Dalam kerjasama erat dengan pihak

berwenang Italia, tim UNHCR secara teratur melakukan kunjungan ke pusat penerimaan sementara di Italia, memantau kondisi penerimaan dan mengadvokasi kepatuhan mereka dengan standar nasional bersama dengan Uni Eropa (Agency, UNHCR UPDATE #10, 2017).

Selain itu, *Information Politics* juga dilakukan melalui menentukan status pengungsi, yaitu UNHCR melakukan verifikasi data. Verifikasi dilakukan UNHCR bersama pemerintah untuk menentukan apakah seseorang merupakan pengungsi atau bukan, berdasarkan Konvensi status pengungsi 1951. Verifikasi tersebut melalui tahapan yang dilakukan UNHCR dengan pembuktian terhadap hal-hal mengenai keadaan pencari suaka, kejadian atau peristiwa yang terjadi pada diri pencari suaka. Setelah itu UNHCR mencari kesesuaian antara definisi pengungsi sebagaimana tercantum dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dengan fakta-fakta yang diberikan oleh pencari suaka. Setelah dilakukannya verifikasi oleh UNHCR, maka UNHCR dapat menentukan bantuan yang akan didapat oleh pengungsi sesuai dengan hak dan kewajiban pengungsi. Adapun proses verifikasi yang dilakukan UNHCR mengenai tahapan RSD adalah registrasi dan aplikasi untuk RSD. Setelah proses registrasi telah dijalankan maka pencari suaka dapat melakukan wawancara (Agency, Refugee Status Determination, 2018).

Dalam wawancara tersebut UNHCR akan membaca informasi yang diberikan pencari suaka saat registrasi, dokumen-dokumen pendukung, mencari informasi soal situasi negara asalnya, mengidentifikasi alasan kepergiannya, apakah ada informasi yang belum tersedia, dan sebagainya. Setelah pengungsi melewati verifikasi dan dinyatakan sebagai pengungsi oleh UNHCR, sebagaimana mandat UNHCR adalah menyediakan perlindungan internasional bagi pengungsi. Dalam kasus pengungsi Libya yang ada di Italia, UNHCR mencari solusi permanen (*durable solution*) melalui integrasi lokal (*local integration*), repatriasi sukarela (*voluntary repatriation*) atau pemukiman kembali di negara ketiga (*resettlement*) (Agency, Refugee Status Determination, 2018).

Data terakhir pada 7 November 2017, telah tercatat sekitar 44 pengungsi dipindahkan dari Libya ke Italia. Selanjutnya, sekitar 51 pengungsi dan pencari suaka, termasuk perempuan, anak-anak dan orang-orang rentan, tiba dari Nigeria ke Italia pada 14 November, setelah evakuasi dari Libya ke Nigeria. Masyarakat yang dievakuasi berasal dari Kamerun, Eritrea, Ethiopia, Somalia, dan Sudan. Sebagian besar dari mereka mengalami penahanan dan pelecehan serius di Libya, dan dievakuasi ke Nigeria dalam konteks Mekanisme Transit Darurat UNHCR (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

B. Strategi *Symbolic Politics*

Dalam penerapan strategi *Symbolic Politics*, UNHCR telah membuat serangkaian kegiatan atau berbagai inisiatif yang akan menjadi katalisator bagi UNHCR untuk memperkuat jaringannya bersama dengan aktor-aktor terkait dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi Libya yang ada di Italia.

Pada 11 Desember 2017, UNHCR memiliki inisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah Italia yang berpartisipasi dalam Skema Akomodasi. Pemerintah Italia merefleksikan pencapaian penting dari program ini, dan berbagi pengalaman positif dan pelajaran yang didapat sambil mencari cara untuk memastikan kelanjutan program ditahun-tahun berikutnya. Pemerintah Italia berharap pada akhirnya bisa menjadi proyek yang berkelanjutan di bawah kendali kota. UNHCR akan bekerja dengan pemerintah kota dan pemerintah pusat sepanjang 2017 untuk secara bertahap mengalihkan implementasi program ke pihak berwenang (Agency, Comment to the UNHCR press on the European Court of Justice's ruling on the outplacement scheme, 2017).

Program-program ini juga membantu integrasi mereka yang pada akhirnya akan tetap berada di Italia. Peninggi di Italia sepakat bahwa pekerjaan masih harus dilakukan untuk mendukung para pencari suaka dan pengungsi layanan akses yang lebih baik, dan untuk mendukung kemandirian. Upaya-upaya ini semakin mendesak dengan meningkatnya jumlah orang yang diakui sebagai pengungsi di Italia sebagai akibat dari meningkatnya kapasitas Layanan Suaka untuk meninjau kasus-kasus, serta peningkatan tingkat pengakuan dari 26% pada 2016 menjadi 46% pada 2017. Pada 2017, sekitar 10.364 masyarakat menerima status pengungsi, hampir empat kali lebih banyak dari tahun 2016 (yaitu sekitar 2.700). Hal ini juga terkait dengan fakta bahwa program relokasi ke negara-negara anggota Uni Eropa lainnya telah ditutup, dan dengan demikian banyak pemohon profil pengungsi yang kasusnya ditinjau di Italia (Agency, Comment to the UNHCR press on

the European Court of Justice's ruling on the outplacement scheme, 2017).

UNHCR pada tahun 2017 telah mengumumkan evakuasi 162 pengungsi yang sangat rentan dari Libya ke Italia, termasuk anak di bawah umur dan perempuan yang ditawan dalam jangka waktu yang lama. Setelah dibebaskan dari pusat penahanan, mereka dikawal ke Tripoli oleh staf UNHCR yang berlokasi di Libya dan kemudian dibawa Italia, di mana mereka mendarat di sebuah pangkalan militer dekat Roma dan kemudian dipindahkan oleh pihak berwenang Italia. Setelah tiba, semua pengungsi menjalani pemeriksaan medis, sebelum memulai prosedur identifikasi, mereka diberi pakaian musim dingin dan makanan panas. Staf UNHCR, termasuk mediator budaya dan ahli hukum, hadir pada saat kedatangan untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang dievakuasi tentang prosedur permohonan suaka. Selanjutnya para pengungsi dipindahkan ke beberapa fasilitas penerimaan. Bantuan dan penerimaan kemanusiaan disediakan oleh Konferensi Episkopal Italia, melalui Caritas. Cochetel menyimpulkan dengan mengatakan bahwa upaya yang dilakukan harus dimasukkan dalam kerangka kerja intervensi yang lebih luas yang bertujuan membangun sistem suaka, mengelola migrasi dengan lebih baik, dan menangani arus kompleks migran dan pengungsi di Libya dan sepanjang rute ke Italia (Agency, UNHCR: First evacuation of 162 vulnerable refugees from Libya to Italy, 2017).

Pada 22 Desember 2017, 162 pengungsi dan pencari suaka telah dievakuasi dari Libya ke Italia. Kelompok ini terdiri dari warga negara Eritrea, Ethiopia, Somalia, dan Yaman yang telah ditahan di Libya, dan termasuk keluarga, ibu tunggal, UASC dan orang-orang penyandang cacat. Operasi menerima dukungan politik yang kuat oleh Menteri Dalam Negeri Italia, dan tim UNHCR Italia dan Libya bekerjasama erat dengan tim operasional kabinet Menteri. Selama konferensi pers yang diadakan di Pratica di Mare, Menteri Dalam Negeri Italia, Bapak Marco Minniti, menyatakan bahwa ini adalah peristiwa bersejarah karena ini adalah pertama kalinya koridor kemanusiaan dibangun langsung dari Libya ke Italia. Dalam

perjanjian dengan Komisi Nasional untuk Hak Suaka, Komisi Wilayah yang kompeten akan memastikan bahwa permohonan suaka dari kelompok diprioritaskan. UNHCR akan terus menindaklanjuti kasus-kasus spesifik yang memastikan penyediaan layanan yang memadai dan prioritas RSD (Molinari, 2017).

Selain itu, UNHCR memanfaatkan momentum-momentum tersebut sebagai kasilitator dalam strategi *Symbolic Politics* dengan bekerjasama dengan UNICEF, IOM, EUROSTAT, dan OECD dalam meluncurkan data tentang kesenjangan tentang pengungsi, pencari suaka, migran dan orang-orang terlantar di Italia dikarenakan dapat membahayakan kehidupan dan kesejahteraan jutaan anak-anak migran. UNHCR bersama dengan kelima lembaga tersebut diatas telah menunjukkan bagaimana data mendasar untuk memahami tren dalam migrasi global dan mengembangkan kebijakan untuk mendukung kelompok yang paling rentan seperti anak-anak. Informasi tentang usia hanya tersedia untuk sekitar 56% dari populasi pengungsi di bawah mandat UNHCR; Hanya sekitar 20% dari negara dan wilayah yang mengumpulkan data tentang pengungsi yang dipindahkan secara internal karena konflik memiliki data yang dirinci berdasarkan usia; Sekitar seperempat negara dan wilayah tidak memiliki data yang dipilah berdasarkan migran berdasarkan usia, termasuk 43% dari negara dan wilayah di Afrika; Kurangnya informasi tentang anak-anak migran dan pengungsi merampas perlindungan dan layanan yang diperlukan anak di bawah umur.

"Banyak anak-anak pengungsi mengalami atau menyaksikan kekerasan dan penderitaan yang belum pernah terjadi di negara asal mereka dan kadang-kadang bahkan selama pelarian mereka untuk mencari perlindungan dan keamanan. Mereka membutuhkan dan pantas mendapatkan perawatan dan perlindungan, tetapi untuk menyediakannya, data tentang identitas dan kebutuhan mereka adalah dibutuhkan. Di daerah mana pun tidak sepenting anak-anak, terutama yang

paling rentan, bahwa ada koordinasi data dan peningkatan kapasitas, "kata Volker Türk, Asisten Komisaris Tinggi UNHCR untuk Perlindungan.

"Kami membutuhkan data yang dapat diandalkan dan lebih baik tentang anak-anak migran, untuk melindungi mereka dan menjamin minat mereka yang lebih tinggi. Pemisahan data berdasarkan usia, jenis kelamin dan asal dapat memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang kebutuhan nyata anak-anak migran. Hal ini akan memastikan bahwa tidak ada anak tertinggal dan tidak dieksploitasi. Semua anak migran berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, terlepas dari status mereka, "kata Direktur Jenderal IOM William Lacy Swing.

Di banyak negara, data nasional yang tersedia tidak mencakup informasi tentang usia, jenis kelamin dan asal pengungsi dan migran, dan bahkan tidak menunjukkan apakah mereka bepergian sendiri atau bersama keluarga. Berbagai kriteria yang digunakan untuk kategori usia dan untuk merekam data menjadikan pembongkaran menjadi tantangan besar. Hal ini membuat organisasi-organisasi kemanusiaan sangat sulit untuk memperkirakan secara akurat berapa banyak anak yang transit atau bermigrasi di seluruh dunia. Data tentang anak-anak yang bergerak secara tidak teratur antar perbatasan, mereka yang dipindahkan atau bermigrasi di dalam perbatasan nasional atau anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua migran, bahkan lebih jarang.

Dengan tidak adanya data yang dapat diandalkan, risiko dan kerentanan yang dihadapi anak-anak selama migrasi tetap tersembunyi dan tidak terjawab. Dalam beberapa konteks, anak-anak yang melintasi perbatasan secara tidak teratur dapat ditahan bersama dengan orang dewasa atau mungkin tidak dapat mengakses layanan penting untuk perkembangan mereka yang sehat, termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan. Bahkan di negara-negara berpenghasilan tinggi, jumlah anak-

anak pengungsi dan migran yang tidak bersekolah tidak diketahui, karena tidak dihitung.

Maka dari itu, UNHCR, UNICEF, IOM, EUROSTAT, dan OECD mengundang negara-negara anggota untuk menanggapi kesenjangan data dan kesaksian tentang anak-anak migran, dan untuk memasukkan unsur-unsur khusus ini untuk anak-anak di *Global compact* untuk migrasi yang aman, tertib dan teratur, yaitu:

- Memisahkan data berdasarkan usia dan jenis kelamin
- Mengatasi masalah utama yang memengaruhi anak-anak yang bermigrasi atau terpaksa meninggalkan rumah mereka;
- Manfaatkan lebih baik data yang ada dan bagikan;
- Mengkoordinasikan pekerjaan data di dalam negara dan lintas batas;
- Lakukan upaya khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang anak-anak (Agency, Joint UNICEF-UNHCR-OIM-EURSTAT and OECD release: Strong data gaps leave refugee, migrant and displaced children in danger and without access to basic services, 2018).

UNHCR menyatakan puas dengan tindakan yang diambil dalam beberapa hari terakhir oleh berbagai negara Eropa untuk mengakhiri kebuntuan di Mediterania yang telah melibatkan sekitar 450 pengungsi dan migran yang terdampar di laut karena ketidakmungkinan memulai operasi pendaratan. Sejak tahun 2017; Pemerintah Prancis, Jerman, Italia, Malta, Spanyol, dan Portugal telah menemukan kesepakatan untuk mengizinkan pendaratan dan bertanggung jawab atas 450 pengungsi yang terlibat, termasuk aplikasi suaka apa pun yang dapat diajukan (Agency, Joint UNICEF-UNHCR-OIM-EURSTAT and OECD release: Strong data gaps leave refugee, migrant and displaced children in danger and without access to basic services, 2018).

"Kami berharap perjanjian ini sekarang diimplementasikan dengan cepat dan efektif. Kemudian, selain mengakhiri pengembaraan pengungsi ini, keputusan yang diambil adalah contoh positif tentang bagaimana, dengan bekerjasama, negara-negara dapat mendukung operasi penyelamatan laut dan mengelola perbatasan sambil menghormati kewajiban internasional hak atas suaka. Pada KTT Dewan Uni Eropa pada akhir Juni, pemerintah Eropa berjanji untuk mengadopsi pendekatan yang lebih berkelanjutan, kolaboratif, terstruktur dan dikelola dengan operasi penyelamatan laut yang efektif. Sampai ini terjadi, perjanjian untuk mengelola kedatangan dari Mediterania akan terus pendek. -term dan tidak berkelanjutan, kepentingan pendekatan Eropa bersama akan rusak dan nyawa lainnya akan beresiko dengan setiap upaya penyeberangan baru " kata Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi (Agency, Joint UNICEF-UNHCR-OIM-EURSTAT and OECD release: Strong data gaps leave refugee, migrant and displaced children in danger and without access to basic services, 2018).

C. Strategi *Leverage Politics*

Dalam penerapan strategi *Leverage Politics*, UNHCR telah berupaya dalam melakukan integrasi lokal terhadap pengungsi Libya yang berada di Italia. Menurut ketentuan yang relevan dalam hukum internasional dan Uni Eropa, para pengungsi harus diberikan akses ke sejumlah hak yang merupakan kunci integrasi di negara suaka yang sejajar dengan warga negara Italia atau Eropa. Namun, terdapat beberapa kekurangan baik dalam undang-undang dan praktik Italia yang dapat menghambat upaya pengungsi untuk menjadi mandiri. Kebijakan integrasi yang ada, yang tidak memperhitungkan kerugian awal pengungsi di pasar tenaga kerja dibandingkan dengan warga negara Italia, membatasi integrasi sosial-ekonomi mereka. Oleh karena itu langkah-langkah yang menawarkan dukungan khusus kepada pengungsi yang mengakses pasar tenaga kerja perlu diluncurkan. Terlebih lagi, dalam banyak kasus, para pengungsi yang telah diberikan suatu bentuk perlindungan internasional mungkin tidak lagi mendapat manfaat dari bantuan yang diberikan kepada para pencari suaka dan oleh karena itu berjuang untuk memiliki akses ke perumahan (INTEGRATION, 2017).

Mengingat Sistem SPRAR memiliki kapasitasnya yang rendah dan efisiensinya terbatas untuk membantu para pengungsi dalam mendapatkan akomodasi yang memadai, sehingga menyebabkan pengungsi miskin dapat menjadi tunawisma. Selain itu, kerangka hukum saat ini tidak melihat implementasi langkah-langkah yang diarahkan untuk mengatasi hambatan administrasi spesifik yang dihadapi pengungsi. Banyak pengungsi, misalnya, kekurangan dokumen atau sertifikat yang tidak dapat mereka peroleh dari negara asal mereka, tetapi mereka diminta untuk memproduksi untuk dapat melaksanakan sejumlah hak, termasuk pengakuan kualifikasi pendidikan dan profesional mereka, atau menjadi bisa menikah. Permintaan dokumen yang membuktikan hubungan keluarga serta keterlambatan menilai aplikasi juga menimbulkan hambatan untuk reuni keluarga (CO-OPERATION, 2018).

Praktik-praktik yang memperkenalkan perlakuan berbeda untuk warga negara dan non-warga negara, yang melanggar hak untuk tidak melakukan diskriminasi, juga merupakan hambatan serius bagi integrasi pengungsi, seperti halnya pembatasan yang diterapkan oleh beberapa otoritas lokal Pemerintah Italia ketika mendaftarkan pengungsi sebagai penduduk lokal. Praktik-praktik ini memiliki efek *knock-on* pada kemampuan pengungsi untuk menikmati hak-hak mereka. Pengungsi tanpa kewarganegaraan diuntungkan oleh persyaratan hukum yang lebih baik untuk naturalisasi, karena mereka diharuskan menunjukkan bahwa mereka telah tinggal di negara ini selama lima tahun, berbeda dengan sepuluh tahun yang diminta dari semua warga negara ketiga lainnya. Mereka mungkin dapat menghadapi sejumlah masalah praktis dalam benar-benar mengakses manfaat ini, antara lain, karena fakta bahwa prosedur ini seringkali agak panjang dan bahwa kriteria pemberian kewarganegaraan Italia meninggalkan margin kebijaksanaan yang cukup besar. Selain itu, anak-anak yang lahir di Italia tidak secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Italia (Agency, Solutions for refugees, 2017).

Tantangan-tambahan lainnya berasal dari pembatasan kebebasan bergerak dan penyelesaian di dalam Uni Eropa dalam hal penerima manfaat perlindungan internasional. Transposisi di Italia dari instruksi warga jangka panjang yang baru-baru ini diamandemen, masih tertunda, atau akan memungkinkan para pengungsi dan penerima manfaat perlindungan anak perusahaan untuk memperoleh status penduduk jangka panjang di Negara-negara Anggota Uni Eropa dengan persyaratan yang sama dengan warga negara ketiga lainnya yang telah tinggal secara legal di Uni Eropa setidaknya selama lima tahun (Agency, Solutions for refugees, 2017).

UNHCR juga percaya bahwa keterlibatan para pengungsi dalam kehidupan politik akan menumbuhkan rasa memiliki mereka di negara suka mereka dan akan memfasilitasi integrasi mereka. Namun, undang-undang Pemerintah Italia saat ini tidak memberikan warga negara ketiga hak untuk memilih, termasuk dalam pemilihan lokal. Mengenai pencari suka, UNHCR mendukung inisiatif,

termasuk dalam program SPRAR atau *the System for the Protection of Asylum Seekers and Refugees*, didukung oleh Kementerian Dalam Negeri yang diarahkan untuk memajukan integrasi mereka jika mereka diakui sebagai pengungsi, seperti biaya kuliah bahasa Italia, pendidikan kewarganegaraan, penilaian keterampilan profesional dan pelatihan kejuruan. UNHCR percaya bahwa langkah-langkah ini dapat membantu mendukung pencari suaka karena mereka harus mengambil keputusan tentang masa depan mereka dan untuk mempromosikan hubungan positif dengan masyarakat setempat. Namun, begitu individu meninggalkan program SPRAR, akses ke langkah-langkah dukungan tambahan akan terbatas dan karenanya prospek integrasi dapat melambat (Parliament, 2017).

Selain itu, dalam penerapan strategi *Leverage Politics*, UNHCR juga telah menekan Pemerintah Italia dalam beberapa tahun terakhir untuk menerima beberapa ratus pengungsi untuk dimukimkan kembali dari negara ketiga di mana mereka tidak dapat mengakses perlindungan yang memadai dan jangka panjang. UNHCR percaya bahwa kemungkinan pengungsi yang berhasil dimukimkan kembali berhasil di dalam komunitas lokal adalah tinggi di sejumlah daerah di mana mereka telah dipindahkan. Inisiatif pemukiman kembali percontohan ini telah menyoroti fakta bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam perencanaan dan pengelolaan dukungan integrasi untuk pengungsi yang bermukim kembali. Oleh karena itu, pembelajaran dapat diambil untuk mempromosikan inisiatif serupa di tempat lain. Lebih jauh, UNHCR menyatakan penghargaan atas penunjukkan baru-baru ini, dalam kabinet yang baru dibentuk, dari Menteri untuk Kerjasama Kerjasama dan Integrasi, dan berharap bahwa Kementerian yang baru akan memelopori kebijakan yang memajukan integrasi pengungsi di Italia (Parliament, 2017).

UNHCR sangat prihatin dengan penggunaan bahasa yang sering dan semakin meningkat dalam wacana publik yang dikalkulasi untuk memicu terjadinya *xenophobia* dan intoleransi. Hal ini dapat merusak hubungan positif antara masyarakat lokal Italia dan yang bukan, sehingga dapat memicu dampak negatif

pada pengungsi dan pencari suaka. UNHCR juga telah melakukan kerjasama dengan Uni Eropa dalam hal integrasi ini, yaitu melalui Program Dewan Eropa tentang Paspor Eropa untuk Kualifikasi Pengungsi (EQPR). Dimana program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengakuan kualifikasi pengungsi meskipun tidak ada dokumentasi yang lengkap dan untuk mengenali kualifikasi pengungsi dan memfasilitasi integrasi mereka ke dalam masyarakat Eropa melalui pendidikan dan pekerjaan (Information, 2018).

Paspor Eropa untuk Kualifikasi Pengungsi (EQPR) adalah satu-satunya instrumen internasional yang dirancang untuk memfasilitasi pengakuan kualifikasi pengungsi. Pengungsi juga dapat menggunakan dokumen ini di negara-negara Eropa lainnya jika perlu. Dengan cara ini biaya dan upaya berkurang karena tidak ada evaluasi lebih lanjut yang diperlukan. Selama fase baru yang dimulai pada 2018, tiga sesi telah diadakan sejauh ini, dua di Yunani dan satu di Italia, di mana 142 wawancara dilakukan, dan 115 Paspor dikeluarkan. Secara keseluruhan, 234 wawancara telah dilakukan sejak awal proyek dan 188 paspor telah dikeluarkan. Inisiatif yang didukung oleh UNHCR sejak fase pertama, melihat partisipasi mitra dari Belgia (Komunitas Flemish), Yunani, Italia, Norwegia dan Inggris. Proyek ini saat ini dalam fase baru (2018-2020) yang melibatkan, di samping mitra asli, mitra baru dari Armenia, Kanada, Prancis, Jerman dan Belanda. Felipe Camargo, Perwakilan Regional UNHCR untuk Eropa Selatan, menggaris-bawahi pentingnya paspor Eropa untuk kualifikasi pengungsi, untuk integrasi lokal pengungsi dalam hal akses ke pasar tenaga kerja dan universitas (Agency, European passport for refugee qualifications in Italy, 2018).

UNHCR juga melakukan Konversi hukum dari keputusan tentang migrasi dan keamanan telah disetujui oleh Senat dan oleh Deputi pada tanggal 7 November dan 27 November 2017. UNHCR diundang untuk menghadiri sidang di hadapan Komisi Urusan Konstitusi dari Kamar Deputi. Pada tanggal 3 November, Corriere della Sera menerbitkan surat dari Perwakilan Regional ROSE yang menegaskan kembali posisi UNHCR sehubungan dengan keputusan hukum tersebut. Pada

tanggal 5 November, UNHCR mengeluarkan siaran pers yang berfokus pada dampak negatif dari beberapa ketentuan yang sedang dibahas. Juga, pada tanggal 26 November, Corriere della Sera menerbitkan surat dari Komisaris Tinggi yang menegaskan kembali kekhawatiran UNHCR atas ketentuan yang sedang dibahas di Parlemen. Sebagai reaksi terhadap perkembangan baru-baru ini pada undang-undang baru, UNHCR telah terlibat dengan rekan-rekan di semua tingkatan untuk memetakan dampak pada orang-orang yang menjadi perhatian (Agency, EUROPE MONTHLY REPORT, 2018).

Kumpulan tekanan ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menawarkan alternatif yang valid untuk perjalanan berbahaya yang dilakukan oleh para pengungsi dan migran di sepanjang rute Mediterania tengah (Agency, UNHCR resumes emergency evacuations of refugees from Libya, 2018).

Dalam penerapan strategi *Leverage Politics*, UNHCR juga melakukan peran dalam Repatriasi sukarela (*Voluntary repatriation*). Pada akhir Maret 2018, UNHCR telah meluncurkan permohonan mendesak untuk 1.300 tempat yang berfungsi untuk pemukiman kembali para pengungsi yang sangat rentan yang terdampar di Lautan Tengah. Lebih dari 1.500 pengungsi dan migran kehilangan nyawa saat mencoba menyeberangi Laut Tengah dalam tujuh bulan pertama pada tahun 2018. Pada bulan Juni dan Juli berikutnya, dikonfirmasi lebih dari 850 orang dan menjadikan Mediterania sebagai rute laut yang paling mematikan di dunia (Agency, UNHCR sounds alarm as Mediterranean Sea deaths pass 1,500 mark, 2018).

UNHCR sendiri prihatin tentang peningkatan tingkat kematian meskipun ada penurunan yang signifikan dalam jumlah kedatangan pantai Eropa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sekitar 60.000 orang melintasi Mediterania tahun ini, setengah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018, menandai kembalinya ke level pra-2014. Namun, untuk setiap 31 orang yang mencoba menyeberang pada Juni dan Juli, satu mati atau hilang, dibandingkan dengan 1 dalam 49 selama 2018 (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

"UNHCR mendesak negara bagian dan otoritas di sepanjang rute transit untuk melakukan segala yang diperlukan untuk membongkar dan menghentikan jaringan perdagangan manusia, dan untuk menyelamatkan nyawa di laut, perlu untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengadili mereka yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi manusia yang rentan " kata Vincent Cochetel, selaku Utusan Khusus UNHCR untuk Mediterania (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Pada bulan Juli 2018, UNHCR mengimbau agar kemampuan pencarian dan penyelamatan diperkuat di laut Mediterania, setelah beberapa pembatasan hukum dan logistik diberlakukan pada operasi kapal-kapal LSM yang terlibat dalam penyelamatan laut. Sebelumnya pada tahun yang sama, telah terjadi beberapa kapal yang membawa orang yang diselamatkan di laut telah dibiarkan selama beberapa hari menunggu untuk menerima informasi mengenai *docking*. Kemampuan pencarian dan penyelamatan yang diperkuat dan mekanisme pendaratan yang aman dan dapat diprediksi adalah landasan dari UNHCR yang bekerjasama dengan IOM, yang menyerukan pendekatan bersama di wilayah ini untuk menyelamatkan jiwa di Mediterania (Agency, UNHCR: exceeded the threshold of 1,500 dead in the Mediterranean, 2018).

UNHCR juga mengulangi permintaan untuk mempercepat prosedur untuk pemberhentian 522 masyarakat yang selama beberapa hari telah naik kapal Penjaga Pantai Italia, setelah itu telah diselamatkan dalam berbagai operasi di Mediterania tengah. Di antara mereka, terdapat 42 masyarakat pengungsi yang selamat dari kecelakaan kapal terjadi, yang menyebabkan hilangnya setidaknya 12 teman seperjalanan (Agency, UNHCR concerned at new measures impacting rescue at sea in the Central Mediterranean, 2019).

"Penderitaan orang-orang yang selamat dari kecelakaan kapal sangat besar. Setelah perjalanan panjang dan berbahaya dari negara asal mereka, yang ditandai oleh kekerasan dan pelecehan di sepanjang jalan, mereka melihat sesama pelancong, mungkin anggota keluarga mereka, mati di laut," kata Carlotta Sami, selaku Juru bicara UNHCR untuk Eropa Selatan (Agency, UNHCR concerned at new measures impacting rescue at sea in the Central Mediterranean, 2019).

UNHCR menegaskan kembali urgensi kemanusiaan yang mendesak yaitu masyarakat yang diselamatkan di laut harus mendarat secepat mungkin. Hal ini juga sejalan dengan pentingnya untuk mengisi ketiadaan informasi yang mengkhawatirkan tentang nasib mereka yang dicegat dan diselamatkan di Mediterania tengah, khususnya berguna bagi personel kemanusiaan yang terlibat dalam bantuan darat (Agency, UNHCR: Land the over 500 survivors without further delay, including the 42 survivors for over 9 days on the high seas, 2018).

Pada tahun 2018, terdapat sekitar 15.500 kedatangan melalui laut di Italia, hal ini merupakan penurunan sekitar 80% dibandingkan dengan 2017. UNHCR juga mendukung mekanisme pendaratan regional yang aman dan dapat diprediksi serta setelah pendaratan terdapat pembagian tanggung jawab yang memadai untuk menghindari situasi di mana negara-negara dikenai sanksi karena harus mengelola sendiri prosedur penurunan berikut ini. UNHCR siap untuk bekerja dengan negara-negara di Eropa dan wilayah Mediterania untuk memastikan bahwa menyelamatkan nyawa dan mempertahankan ruang suka tetap menjadi prioritas bersama (Agency, UNHCR: Land the over 500 survivors without further delay, including the 42 survivors for over 9 days on the high seas, 2018).

"Hal ini merupakan seruan mendesak untuk solidaritas dan kemanusiaan. Kita harus segera menyingkirkan pengungsi yang rentan dari Libya, dan

banyak pengungsi, pencari suaka dan orang-orang tanpa kewarganegaraan di Italia adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk perlakuan kejam yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat," kata Volker Türk, asisten Komisaris Tinggi UNHCR untuk Perlindungan (Agency, UNHCR: Land the over 500 survivors without further delay, including the 42 survivors for over 9 days on the high seas, 2018).

Dengan keadaan masyarakat Libya terus menderita di bawah konflik, evakuasi seperti itu adalah jalur kehidupan bagi para pengungsi yang paling rentan yang tinggal di pusat-pusat penahanan dan daerah perkotaan, yang sangat membutuhkan keselamatan dan perlindungan, seperti para pengungsi berasal dari Eritrea, Ethiopia, Somalia dan Sudan, Banyak dari para pengungsi telah ditahan di Libya dalam waktu lama, beberapa di antaranya lebih dari delapan bulan. Sebelum evakuasi, para pengungsi ditampung di *Gathering and Departure Facility* (GDF) di Tripoli, setelah UNHCR mengamankan transfer mereka dari tahanan. Di GDF, mereka diberi makanan, tempat tinggal, bantuan medis termasuk dukungan psiko-sosial, serta pakaian dan perlengkapan kebersihan. Setelah evakuasi ini, UNHCR telah membantu 1.474 pengungsi yang rentan dengan meninggalkan Libya pada 2019, termasuk sekitar 393 masyarakat ke Italia (Agency, UNHCR evacuates over 1,000 refugees from Libya, 2018).

Sejak November 2018 telah mengevakuasi lebih dari 1.000 pengungsi yang sangat rentan dari Libya dan mengidentifikasi solusi yang tahan lama bagi mereka di Negara Ketiga. Secara total, dalam tiga bulan, terdapat 1.084 pengungsi yang telah dievakuasi sejak awal operasi UNHCR (Agency, UNHCR evacuates over 1,000 refugees from Libya, 2018).

"Evakuasi ini membawa harapan baru bagi kehidupan lebih dari 1.000 pengungsi yang ditahan di Libya dalam kondisi penderitaan ekstrem. Kami berharap untuk mengevakuasi setidaknya seribu lagi

pada akhir 2018," kata Vincent Cochetel, Utusan Khusus UNHCR untuk Mediterania Tengah (Agency, UNHCR evacuates over 1,000 refugees from Libya, 2018).

Di antara 150 pengungsi yang sangat rentan dievakuasi dari Tripoli ke Roma dibulan yang sama, telah terjadi perempuan dan anak-anak yang berada dalam tahanan untuk waktu yang lama. Hal ini merupakan evakuasi kedua dari Libya langsung di Italia yang tidak akan mungkin terjadi tanpa upaya besar dari otoritas Italia dan dukungan dari pemerintah Libya. Terdapat sekitar 312 pengungsi yang dievakuasi langsung ke Italia. Setelah tiba di Roma, para pengungsi menjalani pemeriksaan medis dan diberi makanan panas dan pakaian hangat sebelum memulai prosedur identifikasi. Para pengungsi kemudian dipindahkan ke berbagai fasilitas penerimaan (Agency, UNHCR evacuates over 1,000 refugees from Libya, 2018).

"Evakuasi ini adalah contoh terbaik dari dampak solidaritas internasional terhadap pengungsi itu sendiri, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Sejauh ini hanya 16.940 pos telah tersedia untuk pemukiman kembali di 15 negara utama di sepanjang rute Mediterania tengah, termasuk Libya dan Nigeria. UNHCR menyerukan kepada semua negara untuk menyediakan tempat lain sehingga solusi konkret dapat ditemukan bagi banyak pengungsi lain yang masih di Libya," tambah Cochetel (Agency, UNHCR evacuates over 1,000 refugees from Libya, 2018).

Penerapan strategi *Leverage Politics* dalam peranan UNHCR lainnya yaitu melalui Program Pemukiman Kembali (Resettlement). Tugas utama UNHCR dalam pemukiman kembali adalah mengadakan perjanjian dengan pemerintah negara penerima untuk menyediakan pemukiman yang cocok dan layak bagi pengungsi. Keputusan yang dilakukan oleh Pengadilan Eropa tentang skema pemukiman kembali telah mengirimkan sinyal kuat mengenai pentingnya solidaritas dan

pembagian tanggung jawab antara Negara-negara Anggota Uni Eropa. UNHCR selalu mendukung implementasi yang tepat waktu dari skema relokasi Uni Eropa. UNHCR didorong oleh penekanan yang diberikan oleh Pengadilan pada kebutuhan untuk mendukung Negara-negara Anggota yang berada di bawah tekanan dalam penerimaan pencari suaka. UNHCR menggarisbawahi perlunya Negara-negara Anggota untuk mempercepat proses untuk semua pencari suaka yang memenuhi syarat yang berada di Italia, dan untuk sepenuhnya memenuhi komitmen yang telah mereka tandatangani sebagai isyarat nyata (Agency, Comment to the UNHCR press on the European Court of Justice's ruling on the outplacement scheme, 2017).

Pada tahun 2017, program relokasi sedang bergerak menuju fase terakhirnya, ditandai dengan pentingnya penguatan sistem suaka Eropa. Hal ini penting untuk memastikan para pencari suaka akses ke wilayah tersebut dan distribusi tanggung jawab yang tepat antara Negara-negara Anggota, bahkan dalam keadaan luar biasa. UNHCR menganggap penting bahwa ada lebih banyak solidaritas, terutama secara global. Sistem Relokasi Uni Eropa diluncurkan setelah dua keputusan Dewan Uni Eropa pada September 2015 yang menetapkan pemindahan 160.000 pencari suaka dari Italia ke Negara-negara Anggota Uni Eropa lainnya (Agency, Comment to the UNHCR press on the European Court of Justice's ruling on the outplacement scheme, 2017).

Selain itu, UNHCR mendesak Negara-negara Anggota Uni Eropa untuk segera merelokasi semua pencari suaka yang memenuhi syarat di bawah program penempatan Uni Eropa dan untuk melanjutkan lebih dari dua tahun yang diharapkan pada awalnya. Dalam kondisi saat ini, hanya pencari suaka yang berasal dari kebangsaan yang memiliki tingkat pengakuan 75% atau lebih dipertimbangkan untuk proses relokasi, sedangkan untuk pengungsi masih sangat kurang. UNHCR telah meminta agar kriteria ini ditinjau dan ambang batas ini diturunkan. Dengan cara ini, lebih banyak masyarakat yang kemungkinan besar akan berhak atas hak-hak perlindungan, akan dimasukkan. Relokasi yang cepat, yang mencakup pendaftaran

kandidat secara cepat, sangat penting khususnya bagi anak di bawah umur yang tidak ditemani yang sering kali lebih membutuhkan di Italia (Agency, UNHCR calls for the EU outplacement program to continue, 2017).

Pada bulan September 2017, negara-negara anggota Uni Eropa telah meluncurkan rencana dua tahun untuk merelokasi 160.000 pencari suaka, termasuk 106.000 dari Italia, ke negara-negara Eropa lainnya untuk mengurangi tekanan pada negara-negara perbatasan. Selanjutnya, pada 22 September 2017, negara-negara bagian secara resmi berkomitmen untuk merelokasi 47.905 orang, dan sejauh ini 9.078 dari Italia telah dipindahkan. UNHCR akan terus memberikan dukungan untuk relokasi dari Italia (Agency, UNHCR calls for the EU outplacement program to continue, 2017).

Pada 2017 juga, UNHCR bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri Italia untuk meningkatkan upaya penerapan relokasi UASC. Relokasi yang efektif sangat penting untuk membantu meningkatkan solidaritas dan mempromosikan pembagian tanggung jawab di Eropa, memastikan pengelolaan gerakan populasi yang lebih baik, serta dapat membantu menangani gerakan sekunder yang tidak teratur dan mengandalkan jaringan penyelundup. Hal ini sangat penting mengingat meningkatnya jumlah pengungsi yang tinggal di Italia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena meningkatnya bantuan untuk prosedur identifikasi dan sidik jari sesuai dengan Peraturan Dublin, penerapan pendekatan hotspot, dan peningkatan kontrol di perbatasan dengan Perancis, Swiss dan Austria, membuat keberangkatan selanjutnya melintasi perbatasan utara Italia lebih sulit. UNHCR juga telah mengerahkan tim ke Italia utara, di mana mereka memantau dampak potensial dari perjanjian penerimaan kembali yang dilaksanakan di perbatasan utara pada akses ke prosedur perlindungan internasional, dengan fokus khususnya pada pengungsi dengan kebutuhan khusus, seperti UASC. Selanjutnya, tim UNHCR melakukan kegiatan pengembangan kapasitas dengan maksud untuk membantu pihak berwenang dalam memberikan informasi kepada pengungsi yang sedang

transit sehubungan dengan suaka dan prosedur relokasi (Agency, UNHCR UPDATE #10, 2017).

UNHCR telah menyelesaikan 23 evakuasi dari Libya sejak November 2017. Sekitar 2.476 pengungsi yang rentan dan pencari suaka dilepaskan dari pusat penahanan dan dievakuasi dari Libya ke Italia sekitar 312 orang, sisanya ke Nigeria dan Rumania (95). Dalam kerjasama erat dengan EASO, UNHCR menyediakan calon relokasi potensial dengan layanan dan informasi yang menarik. Sepanjang tahun 2016, Diantara pengimplementasian keputusan Dewan Uni Eropa September 2015 tentang relokasi dan akhir Desember 2016, total sekitar 2.654 orang dipindahkan dari Italia, meskipun pada Desember 2016 juga telah tercatat jumlah relokasi bulanan tertinggi sejauh ini, namun hal ini masih hanya 6,7% dari 39.600 target dan harus dipenuhi pada akhir September 2017. Sejak penerapan skema relokasi, Negara Italia menerima 5.839 janji dari negara-negara Eropa yang berpartisipasi, sementara hampir 27.000 kandidat pengungsi potensial mencapai pantai Italia selama periode yang sama (Agency, UNHCR UPDATE #10, 2017).

UNHCR menegaskan kembali seruannya untuk sistem suaka yang diperkuat yang memastikan akses ke tanah dan prosedur suaka yang efisien dan mampu membagi tanggung jawab secara adil bagi pencari suaka antara Negara-negara Anggota Uni Eropa, bahkan dalam keadaan luar biasa (Agency, UNHCR calls for the EU outplacement program to continue, 2017).

Setahun setelahnya, UNHCR meluncurkan operasi evakuasi penyelamatan jiwa pertama dari Libya, hampir 2.500 pengungsi yang paling rentan dan pencari suaka yang sebelumnya ditahan di Libya dipindahkan ke Italia. Dengan evakuasi terakhir, sekitar 132 pengungsi dan pencari suaka, termasuk perempuan dan anak-anak, dipindahkan dari Tripoli ke Nigeria kemarin, di mana mereka ditempatkan di pusat transit darurat UNHCR, sementara solusi jangka panjang dicari untuk mereka (Agency, New UNHCR evacuation of refugees from Libya to Italy, as Tripoli fighting continues, 2019).

Semua pengungsi yang dievakuasi ditahan di fasilitas Triq Al Sikka dan Abu Salim di Tripoli. Sebagian besar ditahan

setelah dicegat atau diselamatkan di laut dalam upaya untuk menyeberangi Mediterania dari Libya ke Italia. Mengingat bahaya yang dialami pengungsi dan migran di Libya, UNHCR tidak percaya bahwa negara ini merupakan tempat yang aman untuk pendaratan dan juga menyarankan agar tidak kembali ke Libya setelah operasi pencarian dan penyelamatan di laut (Agency, New UNHCR evacuation of refugees from Libya to Italy, as Tripoli fighting continues, 2019).

"Pengungsi di Libya menghadapi skenario mimpi buruk. Mereka telah meninggalkan rumah mereka untuk mencari keamanan dan perlindungan hanya untuk berakhir di penjara, mendekam tanpa batas waktu, serta dalam kondisi jorok," kata Roberto Mignone, kepala misi UNHCR di Libya (Agency, New UNHCR evacuation of refugees from Libya to Italy, as Tripoli fighting continues, 2019).

UNHCR mendesak semakin banyak negara untuk menawarkan lebih banyak pos pemukiman kembali bagi banyak pengungsi yang tersisa di Libya dan yang perlu segera dievakuasi (Agency, With nearly 2,500 people evacuated from Libya, UNHCR calls for more seats for resettlement and an end to detention, 2018).

D. Strategi *Accountability Politics*

Dalam penerapan strategi *Accountability Politics*, UNHCR telah melakukan peran *controlling* baik secara kelembagaan hingga bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Sejak awal tahun 2017, terdapat lebih dari 1.700 kematian dari pengungsi dan hal tersebut menandakan bahwa tingkat kematian dan pengungsi hilang selama penyeberangan di Laut Mediterania telah meningkat secara drastis. Hanya pada bulan September ditahun tersebut, satu dari delapan orang meninggal atau hilang dalam upaya untuk mencapai Eropa melalui Mediterania tengah, tetapi sebagian besar karena pengurangan kapasitas pencarian dan penyelamatan. Selain

kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pencarian dan penyelamatan, UNHCR dan IOM telah mengusulkan perjanjian regional yang dapat dilakukan yang akan membuat operasi pendaratan dan penerimaan dapat diprediksi dan cepat (Agency, UNHCR and IOM appeal to European leaders for finding solutions to deaths in the Mediterranean, 2018).

Sejak 2017 juga, UNHCR telah menjalin kemitraan dengan sejumlah LSM di Italia, dengan tujuan untuk meningkatkan pemberian perlindungannya, dengan fokus khususnya pada pencegahan dan tanggapan SGBV, perlindungan dan integrasi anak. Mitra UNCHR yaitu Uni Eropa, AIDOS, ARCI, Cambalache, Caritas (Consortio Communitas), Carta di Roma, CIDAS, Consiglio Italiano Rifugiati, Di.RE, Fondazione Adecco, Intersos, LILA Catania, MEDU, dan Universitas Pollenzo dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi di Italia (Agency, UNHCR and IOM appeal to European leaders for finding solutions to deaths in the Mediterranean, 2018).

UNHCR dan IOM juga mendesak para pemimpin Eropa untuk mengarahkan diskusi minggu ini pada solusi praktis yang harus diadopsi dengan sangat mendesak dan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa tanggung jawab dibagi antara negara-negara Eropa. Pada saat yang sama, UNHCR dan IOM juga menyambut kemajuan yang dibuat sejauh ini oleh beberapa Negara Anggota Uni Eropa untuk sampai pada pembagian tanggung jawab dalam mengimplementasikan solusi untuk pencarian, penyelamatan, dan pendaratan migran pasca-pengungsi (Agency, UNHCR and IOM appeal to European leaders for finding solutions to deaths in the Mediterranean, 2018).

Selain itu, UNHCR dan IOM juga mengingatkan para pemimpin Eropa untuk tetap fokus pada implementasi prioritas yang telah disepakati sebelumnya dalam Deklarasi Politik dan dalam Rencana Aksi Valletta, di mana negara-negara menyatakan solidaritas yang mendalam dalam menangani penyebab utama di dasar arus migrasi paksa dan tidak teratur, pada saat yang sama mendukung negara-negara yang menerima banyak pengungsi dan migran. Terdapat juga kebutuhan untuk

dukungan yang lebih besar dan lebih efektif dari para pemimpin Uni Eropa untuk pengembangan solusi struktural jangka panjang yang dapat meningkatkan kondisi di negara asal dan transit, sehingga orang memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang layak (Agency, UNHCR and IOM appeal to European leaders for finding solutions to deaths in the Mediterranean, 2018).

Pada 6 Mei 2017, UNHCR menyambut dengan baik komunikasi dari Menteri Luar Negeri Angelino Alfano yang ingin berkontribusi pada kegiatan bantuan kemanusiaan Badan di Libya dengan 10 juta euro. Oleh karena itu, Pemerintah Italia menegaskan komitmennya yang besar kepada para pengungsi, khususnya pengungsi Libya yang ada di Italia dengan mengkonsolidasikan dan meningkatkan kontribusinya bagi UNHCR. UNHCR telah efektif menjalankan strategi *Accountability Politics*, yang ditandai dengan Pemerintah Italia sebagai anggota "*Donors Club*" yang menyediakan dana kepada UNCHR setidaknya 20 juta euro. Jumlah kematian di Mediterania Tengah pada tahun 2016 adalah yang tertinggi yang pernah tercatat, sekitar 5.000, sedangkan 2017 adalah tahun yang sangat mengkhawatirkan dengan lebih dari 1.000 korban (Agency, The United Nations Agency for Refugees welcomes the strong and concrete support offered by the Italian Government for the humanitarian assistance plan in Libya, 2017).

Selain itu, UNHCR menyambut baik peluncuran program "*Koalisi Pengungsi Eropa*" yang dinisiasi oleh Uni Eropa. Dengan cara berkoalisi, yakni dengan menyatukan perwakilan pengungsi yang tinggal di berbagai negara Eropa, bertujuan untuk memberikan suara kepada para pengungsi di Eropa dan untuk memastikan bahwa pandangan dan kebutuhan mereka dipertimbangkan dengan lebih baik dalam keputusan dan kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka. Hal ini juga akan mempromosikan tindakan konkret yang ditujukan untuk memperkuat hak-hak pengungsi dan meningkatkan proses integrasi di negara tuan rumah (Agency, UNHCR welcomes the launch of the "European Refugee Coalition", 2018).

Pertemuan pertama yang diselenggarakan berkat dukungan dari Kota Milan dan bekerjasama dengan kelompok Nirlaba, Diplomat Independen, dan UNHCR, diadakan dari 13 hingga 15 Desember 2017. 15 perwakilan pengungsi, yang saat ini tinggal di Austria, Belgia, Finlandia, Jerman, Italia, Lithuania, Swedia, dan Hongaria, membahas tujuan program Koalisi ini dan dapat menyiapkan *platform* di mana mereka akan dapat menangani masalah yang berkaitan dengan kebutuhan perlindungan dan integrasi para pengungsi di Eropa. Di antara anggota kelompok, yang berasal dari Libya, Afghanistan, Suriah, Somalia, Irak, Aljazair, Nigeriaia, Ethiopia, dan Rusia, ada guru, jurnalis, penulis, dan aktivis LGBTI (Agency, UNHCR welcomes the launch of the "European Refugee Coalition", 2018).

*"UNHCR sangat percaya pada pentingnya Koalisi Pengungsi Eropa. Inisiatif ini akan memperluas partisipasi aktif para pengungsi dalam proses pengambilan keputusan untuk menanggapi situasi dan kebutuhan mereka, dan akan memastikan bahwa keputusan ini relevan, efisien dan tepat sasaran. Kami juga akan berkonsultasi dengan Koalisi mengenai serangkaian kebijakan dan inisiatif yang sedang dilakukan UNHCR di Eropa."*kata Pascale Moreau, selaku Direktur Biro untuk Eropa UNHCR (Agency, UNHCR welcomes the launch of the "European Refugee Coalition", 2018).

UNHCR berharap bahwa langkah-langkah yang direncanakan untuk menciptakan sistem yang efektif untuk inklusi sosial para pencari suaka dan pengungsi akan didukung oleh kemauan dan sumber daya yang memadai di pihak lembaga. Sementara investigasi sedang berlangsung dan tanggung jawab agresi ini sedang diklarifikasi, UNHCR dengan kuat memantau setiap upaya yang tidak bertanggung jawab untuk menggerakkan diskriminasi dan mengeksploitasi insiden serius seperti ini, dan menyerukan kejahatan kebencian untuk secara eksplisit distigmatisasi (Agency, UNHCR statement on

the wounding of the young Malian Bouyagui Konate: Italy is committed to promoting concrete actions to prevent intolerance and indifference towards refugees and asylum seekers, 2018).

UNHCR mengimbau semua anggota masyarakat Italia untuk mempromosikan tindakan nyata untuk mencegah intoleransi dan ketidakpedulian dan untuk menyebarkan iklim inklusi, menyambut para pengungsi dan pencari suaka dan melawan eksploitasi penuh kebencian yang bertujuan untuk mengecualikan mereka dan meminggirkan mereka (Agency, UNHCR statement on the wounding of the young Malian Bouyagui Konate: Italy is committed to promoting concrete actions to prevent intolerance and indifference towards refugees and asylum seekers, 2018).

Hal ini juga didukung dengan UNHCR dapat menyambut kedatangan 103 pengungsi yang dievakuasi dari Libya, banyak dari mereka memiliki kebutuhan khusus. Mereka merupakan kelompok pertama orang yang dievakuasi yang sebelumnya telah diterima di fasilitas transit baru dan keberangkatan ke Tripoli, diresmikan pada awal Desember 2018 (Agency, UNHCR welcomes the arrival in Italy of 103 refugees evacuated from Libya, 2018).

Pengungsi yang dievakuasi merupakan masyarakat KoLSM (5), Eritrea (38), Ethiopia (1), Somalia (48) dan Sudan (11). Di antara mereka adalah 56 wanita dewasa, 31 anak di bawah umur disertai dan 5 anak di bawah umur tanpa pendamping atau terpisah. Kebanyakan wanita melaporkan menjadi korban kekerasan seksual dan berbasis gender, dan banyak yang berbicara tentang "neraka" Libya. Salah satunya kekurangan gizi, dan mengatakan dia baru saja melakukan aborsi. UNHCR akan melakukan misi dalam beberapa minggu mendatang untuk memonitor status pendatang baru (Agency, UNHCR welcomes the arrival in Italy of 103 refugees evacuated from Libya, 2018).

UNHCR juga menyambut baik dari persetujuan yang dibuat oleh Majelis Umum PBB yang menginisiasi perjanjian *Global Compact* untuk migrasi yang aman teratur. *Global Compact* adalah perjanjian internasional pertama yang dinegosiasikan antara pemerintah di bawah naungan

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mencakup semua dimensi migrasi internasional. Hal ini berakar pada kerangka peraturan yang ada tentang hak asasi manusia (Agency, UNHCR welcomes the migration agreement, 2018).

Global Compact on Refugees didasarkan pada sistem peraturan perlindungan internasional yang ada untuk pengungsi - yaitu orang-orang yang melarikan diri dari konflik, kekerasan, atau penganiayaan. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kerjasama internasional dalam menanggapi arus besar pengungsi, dengan dukungan yang lebih sistematis dan kuat bagi mereka yang terpaksa meninggalkan rumah mereka, serta untuk masyarakat setempat (Agency, UNHCR welcomes the migration agreement, 2018).

Keputusan untuk secara resmi menyetujui pakta migrasi di Majelis Umum merupakan kelanjutan dari penerapannya selama konferensi antar pemerintah pada 10 Desember 2018 di Marrakech. Perjanjian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kerjasama internasional dalam menanggapi mobilitas manusia - arus migrasi di satu sisi dan gerakan pengungsi di sisi lain. *Global Compacts* ini lahir dari Deklarasi Pengungsi dan Migran New York pada September 2016, dan dikembangkan sesuai dengan proses paralel selama dua tahun terakhir. Perjanjian ini menyediakan kerangka kerja yang tidak mengikat untuk meningkatkan kerjasama internasional. UNHCR akan mendukung implementasi perjanjian tentang migrasi melalui keikutsertaannya dalam proses migrasi PBB, bersama dengan organisasinya yang lain (Agency, UNHCR welcomes the migration agreement, 2018).

Sepanjang 2018, terjadi perubahan signifikan pada pola rute yang diambil oleh pengungsi dan migran menuju Eropa. Untuk paruh pertama, lebih banyak orang tiba di Yunani daripada Italia atau Spanyol, di babak kedua, titik masuk utama menjadi Spanyol karena semakin banyak orang mencoba laut yang berbahaya menyeberangi Mediterania Barat (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Selain itu, Pengawal Pantai Libya meningkatkan operasinya dengan hasil sekitar 85% dari mereka yang

diselamatkan atau dicegat di Daerah Pencarian dan Penyelamatan Libya (SRR) yang baru didirikan diberangkatkan di Libya, di mana mereka menghadapi penahanan dalam kondisi yang mengerikan (termasuk akses terbatas ke makanan dan wabah penyakit di beberapa fasilitas, bersama dengan beberapa kematian). Akibatnya, lebih banyak kapal yang berisi pengungsi dan migran berusaha berlayar di luar SRR Libya untuk menghindari penjaga pantai - baik untuk membuat tanah di Malta dan Italia atau setidaknya untuk mencapai wilayah pencarian dan penyelamatan dari yurisdiksi tersebut. Tren ini diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2019. Meskipun jumlah keseluruhan kematian di laut di Mediterania Tengah lebih dari setengahnya pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat kematian per jumlah orang yang mencoba melakukan perjalanan meningkat tajam. Pada persimpangan dari Libya ke Eropa, misalnya, tarif beralih dari satu kematian untuk setiap 38 kedatangan pada 2017 menjadi satu untuk setiap 14 kedatangan tahun lalu. Korbannya sangat berat di Mediterania Barat, pada rute ke Spanyol, di mana jumlah kematian hampir empat kali lipat pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Sebagian besar tren ini tampaknya akan berlanjut pada tahun 2019, dengan akar penyebab dari perpindahan migrasi - seperti pelanggaran hak asasi manusia dan konflik atau kemiskinan - tetap tidak terselesaikan. Bagi banyak orang, penyeberangan laut hanyalah langkah terakhir dalam sebuah perjalanan yang melibatkan perjalanan melalui zona konflik atau gurun, bahaya penculikan dan penyiksaan untuk tebusan, dan ancaman dari para pedagang manusia. UNHCR juga menyerukan kepada Negara-negara untuk berhenti menangkap dan mengembalikan ribuan orang ke negara-negara tetangga tanpa mengizinkan mereka mencari suaka atau menilai secara individu apakah mereka memiliki perlindungan internasional atau kebutuhan kemanusiaan lainnya - sebuah praktik yang dikenal sebagai "push-backs" - serta untuk sangat meningkatkan upaya untuk melindungi anak-anak - ditemani atau sendirian - dan untuk memberikan dukungan bagi para

korban kekerasan seksual dan berbasis gender, serta akses yang lebih baik ke jalur yang aman dan legal sebagai alternatif dari perjalanan berbahaya ini (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Pada tahun 2018 juga telah membawa beberapa perkembangan positif. Lebih banyak negara berkomitmen untuk memukimkan kembali pengungsi yang dievakuasi dari Libya, sehingga memungkinkan UNHCR untuk membawa lebih banyak orang ke tempat yang aman melalui Mekanisme Transit Darurat yang didirikan di Niger. Pada akhir tahun, UNHCR membuka Fasilitas Pertemuan dan Keberangkatan di Tripoli, memungkinkan pembebasan lebih banyak orang dari tahanan. Beberapa Negara Anggota Uni Eropa juga berkomitmen untuk relokasi orang yang diselamatkan di Mediterania Tengah - suatu tanda potensi aksi bersama internasional (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Laporan ini juga menyerukan pembentukan mendesak respon regional terkoordinasi dan dapat diprediksi untuk menyelamatkan di laut, serta berbagi tanggung jawab yang lebih besar secara umum. Hal tersebut harus mencakup peningkatan kapasitas penyelamatan, titik-titik turun yang ditentukan dan dapat diprediksi, lebih solidaritas dan dukungan bagi negara-negara di mana sebagian besar pengungsi dan migran tiba, akses yang lebih baik ke jalur yang aman dan legal (seperti pemukiman kembali, penyatuan kembali keluarga, skema pendidikan dan tenaga kerja), perlindungan yang lebih besar untuk anak-anak tanpa pendamping dan penyintas kekerasan berbasis gender dan gender, dan tindakan lebih keras terhadap pelaku kejahatan terhadap pengungsi dan migran, termasuk pedagang dan penyelundup (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Tabel 2.1 : Data Kedatangan Pengungsi dari berbagai Negara di Eropa pada tahun 2015-2018



Sumber : (Agency, UNHCR resumes emergency evacuations of refugees from Libya, 2018).

Tepat setelah enam bulan setelah keputusan Italia untuk mengakhiri pendaratan di pelabuhan masyarakat Italia diselamatkan di lepas pantai Libya, pendaratan setelah penyelamatan di operasi laut (selain dari yang dilakukan oleh Penjaga Pantai Libya atau oleh otoritas Malta atau Italia) terus ditangani pada suatu kasus -dasarkan kasus negara-negara pantai Uni Eropa dalam koordinasi dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya yang bersedia mempertimbangkan relokasi. Pada tahun 2018, hal tersebut dapat mengakibatkan pengungsi dan migran harus menunggu beberapa hari sebelum diizinkan untuk turun. Kapal-kapal yang terlibat dalam penyelamatan laut menghadapi ketidakpastian atas akses ke pelabuhan-pelabuhan yang aman di dekatnya dan telah ada beberapa laporan dari para penyintas kapal yang lewat tanpa bantuan sebelum akhirnya diselamatkan. Dalam kasus lain, ada perselisihan antara negara-negara Eropa tentang apakah sebuah kapal dalam kesulitan atau tidak karena melewati sebuah negara bagian pencarian dan penyelamatan, ditambah dengan tuduhan menghindari tanggung jawab mereka untuk melakukan penyelamatan (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Setelah pertengahan Juni tahun 2018, Pasukan Penjaga Pantai dan Angkatan Laut Italia - yang sampai saat itu telah menyelamatkan lebih dari 2.600 orang yang telah meninggalkan Libya pada tahun 2018 - tidak melakukan penyelamatan lebih lanjut di lepas pantai Libya. Demikian pula, kapal-kapal yang dikerahkan ke Operasi Sophia dari *EUNAVFOR Med*, yang hingga Mei telah menyelamatkan lebih dari 2.200 orang, kemudian menyelamatkan hanya satu kelompok lagi antara Juni dan Desember 2018. LSM-LSM yang antara Januari dan Mei bertanggung jawab atas penyelamatan hampir 5.000 orang tiba-tiba menghadapi pembatasan baru yang mengurangi kehadiran mereka di zona penyelamatan. Kapal dagang yang sebelum Juni diselamatkan hampir 600 orang tiba-tiba diminta untuk menyelamatkan lebih dari 700 orang pada Juni saja. Mereka kemudian menghadapi akses terbatas ke port. Setelah Juni, hanya dua penyelamatan lagi oleh kapal dagang yang menghasilkan 79 orang yang berangkat dari

Libya turun di Eropa (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Pembentukan SRR berarti sejalan dengan kewajiban yang timbul dari hukum maritim internasional, sebuah negara berkomitmen untuk mengkoordinasikan operasi pencarian dan penyelamatan di wilayah tersebut dan melaksanakan tanggung jawab utama ketika penyelamatan dilakukan dalam SRR-nya untuk memastikan kerjasama dan koordinasi untuk pendaratan. Namun, hukum maritim internasional tidak menentukan di mana orang yang diselamatkan di wilayah itu harus diturunkan selama pelabuhan itu aman dan pendaratannya dilakukan secepat mungkin secara wajar. UNHCR bersama LSM-LSM dan kapal komersial yang terlibat dalam pencarian dan penyelamatan telah mencatat bahwa pada beberapa kesempatan Penjaga Pantai Libya meminta agar orang yang diselamatkan di perairan internasional diserahkan kepada mereka, sehingga mereka dapat diturunkan di Libya (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Pemukiman kembali tetap menjadi jalur hukum utama bagi para pengungsi dan pada tahun 2018, jumlah pengungsi yang dipindahkan ke Eropa sedikit menurun dari hampir 27.500 pada 2017 menjadi 24.185 pada akhir November, dan di Inggris, Swedia, Prancis, Jerman, dan Norwegia memukimkan sebagian besar pengungsi dengan Suriah sejauh ini merupakan kelompok terbesar yang dimukimkan kembali dari Turki, Lebanon, Yordania, dan Mesir. Warga negara Republik Demokratik Kongo, Eritrea dan Sudan adalah kelompok terbesar berikutnya yang akan dipindahkan. Mengikuti panggilan UNHCR pada bulan September 2017 untuk 40.000 tempat pemukiman kembali tambahan bagi para pengungsi di 15 negara prioritas di sepanjang rute Mediterania Tengah, negara-negara pemukiman kembali telah menjanjikan 39.698 tempat, di mana 14.450 tempat dijanjikan oleh negara-negara Eropa. Sampai akhir November 2018, sekitar 10.182 dari pengungsi ini telah dimukimkan kembali (Agency, UNHCR resumes emergency evacuations of refugees from Libya, 2018).

Karena banyaknya bahaya yang dihadapi pengungsi di Libya, UNHCR telah membentuk Mekanisme Transit Darurat

(ETM) bersama dengan pemerintah Niger. Hal ini merupakan mekanisme di mana para pengungsi yang dievakuasi dari Libya dapat sementara ditampung di negara itu sampai mereka dapat dimukimkan di tempat lain. Beberapa negara Eropa, termasuk Belgia, Finlandia, Prancis, Jerman, Italia, Malta, Belanda, Norwegia, Swedia, Swiss, dan Inggris, serta Kanada telah berkomitmen untuk menyediakan tempat-tempat pemukiman kembali dan menerima pengungsi yang dipindahkan yang dievakuasi dari pusat penahanan di Libya ke Niger melalui ETM. Sekitar 2.879 pengungsi telah dievakuasi dari Libya sejak awal program. Pada 2018, Italia juga mengevakuasi 253 langsung dari Libya. UNHCR menghargai bahwa negara-negara pemukiman telah berjanji untuk menyediakan total 5.456 tempat-tempat pemukiman kembali sejauh ini, tetapi masih banyak komitmen yang masih dibutuhkan (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).

Pengungsi yang berharap untuk bersatu kembali dengan anggota keluarga di Eropa terus menghadapi hambatan signifikan tahun lalu yang membuat banyak dari mereka terpisah. Hambatan-hambatan ini termasuk definisi restriktif keluarga yang diterapkan oleh beberapa negara, kesulitan mendapatkan akses ke kedutaan yang relevan untuk menerapkan, kurangnya akses ke dokumentasi yang diperlukan untuk membuktikan hubungan keluarga, biaya tinggi yang terlibat dalam proses, dan tertunda atau lebih terbatas akses ke reunifikasi keluarga untuk penerima manfaat perlindungan anak perusahaan. Beberapa perkembangan positif dan efektif juga dicatat pada tahun 2018, seperti Italia membuka pusat layanan baru di negara-negara utama tempat tinggal pengungsi, termasuk Mesir, Kenya, dan Ethiopia, untuk membantu anggota keluarga pengungsi dengan aplikasi mereka untuk penyatuan kembali keluarga. Penggunaan positif visa kemanusiaan oleh beberapa negara Eropa berlanjut pada 2018 termasuk melalui program-program yang didirikan bersama antara organisasi-organisasi berbasis agama dan pemerintah Belgia, Prancis, dan Italia. Hal tersebut membuktikan bahwa UNHCR dan LSM-LSM terkait telah efektif dan progresif dalam memfasilitasi

kedatangan banyak warga negara Libya, Suriah, Eritrea, dan Ethiopia dan mengurangi permasalahan pengungsi Libya yang berada di Italia. (Agency, Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe's borders, 2018).